

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama masih sering dijadikan dalih sebagian orang untuk mewujudkan ketimpangan gender. Asumsi bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, cengeng, dan mempunyai standart akal di bawah laki-laki sudah mengkristal dalam benak pemahaman mereka. Perempuan dikondisikan sedemikian rupa supaya mereka menganggap dirinya tidak layak disejajarkan dengan laki-laki.¹ Lebih naif lagi, jika ketimpangan tersebut justru tumbuh subur dan mengakar di lembaga pendidikan seperti pesantren.

Pesantren menurut Mastuhu, merupakan sebuah komunitas sosial tersendiri antara kiai, ustadz, santri dan pengurus pesantren yang hidup secara bersama. Dalam kehidupan komunal tersebut, nilai-nilai Islam menjadi landasan hidup dan pada gilirannya membentuk kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang eksklusif dan membedakan komunitas pesantren dari masyarakat yang berada di luarnya.² Pondok pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan Islam karena merupakan lembaga yang berupaya menanamkan nilai-nilai Islam di dalam diri para santri.³ Terdapat beberapa aspek yang merupakan elemen dasar dari pesantren yang perlu dikaji lebih mendalam mengingat pesantren merupakan sub kultur dalam kehidupan masyarakat kita sebagai suatu bangsa.

¹ Nasaruddin Umar, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 55.

² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), 74.

³ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Jakarta: Raja Wali), 73.

Dawam Rahardjo memberikan gambaran pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Identitas pesantren pada awal perkembangannya, sekarang telah banyak mengalami perubahan di masyarakat, sebagai akibat pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya nanti pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah perubahan yang deras.⁴ Bahkan karena menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi.⁵

Salah satu kenyataannya, wacana terkait kesetaraan gender masih sering menjadi polemik di lingkungan pesantren. Bahkan, upaya untuk mensosialisasikan hal tersebut tidak jarang mendapatkan resistensi dari sebagian kalangan pesantren. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa gender merupakan produk ‘Barat’ yang berkembang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Alhasil, mayoritas pesantren khususnya yang berada di Jawa masih tetap mempertahankan nilai-nilai gender tradisional yang sebagian besar bersumber pada penafsiran-penafsiran ulama terdahulu.

Abidah El-Khalieqy dalam bukunya *Perempuan Berkalung Sorban* memberikan gambaran tentang tradisi patriarki di Pesantren, yakni dikotomi yang memosisikan perempuan hanya sebagai *kanca wingking* dan tidak

⁴ Ibid. 6-7

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* cet. 2 (Jakarta: LP3ES, 1994), 18.

memiliki banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, terutama di pesantren yang kental dengan akulturasi budaya Islam-tradisional.⁶

Islam dengan sejarahnya yang keras dalam berhadapan dengan keterbelakangan budaya di Arab, memiliki sejarah buruk tentang perlakuan terhadap perempuan⁷. Hanya saja, dalam perkembangannya dialektika mengenai Islam melahirkan kelompok-kelompok moderat yang mengangkat derajat perempuan menjadi lebih baik, namun di sisi lain masih terdapat paham fundamentalisme Islam yang radikal dan ekstrem dalam mengungkung perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang lebih layak.

Jika menengok jauh kebelakang sesungguhnya dalam pertumbuhan sejarah Islam, al- Qur'an dan hadith mewujud sebagai alat untuk membangun teks-teks lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera suatu masa tertentu setelah masa turunnya al- Qur'an itu sendiri. Khususnya kitab-kitab klasik (kitab kuning) karya para ulama' salaf yang menjelaskan superioritas kaum laki-laki atas kaum perempuan yang masih subur dikaji di pesantren salaf. Teks-teks itu sebenarnya merupakan karya intelektual serta produk budaya yang lebih terikat dengan konteks kultur yang melatarinya, dengan

⁶ Abidah El-Khalieqy, *Perempuan Berkalung Sorban* (Arti Bumi Intaran, Yogyakarta). 2001

⁷ Sumber otentik yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengetahui keadaan wanita pada masa Jahiliyah adalah Al-Quran, yang dengan gamblang menyebutkan pembunuhan bayi perempuan sebagai sebuah praktek yang umum di kalangan Arab pada masa Nabi Muhammad SAWW. Bahkan, Al-Quran akan mengambil pertanggungjawaban pada Hari Pengadilan, sebagaimana yang dapat kita sinyalir dari firman Allah SWT: "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dibunuh". (QS.Al-Takwir: 8-9)

Begitupula Nabi Muhamad diutus, saat kerusakan moral terjadi dimana-mana dan menguasai semua aspek kehidupan, salah satu bentuk dekadensi moral yang terjadi pada waktu itu adalah wa'd, yaitu pembunuhan anak perempuan. Mereka merasa terhina disaat mempunyai anak perempuan, karena perempuan merupakan sumber kehinaan dan kelemahan bagi kaumnya. Kalau disampaikan kepada mereka perihal kelahiran anak perempuannya, maka memerahlah muka mereka karena marah, seperti yang digambarkan dalam ayat: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah". (QS.Al-Nahl:58)

lingkungan sosial atau aliran teologi yang menjadi payungnya dari pada dengan kontekstual al- Qur'an sendiri.⁸

Aminah Wadud Muhsin dalam buku *Qur'an and Women*, yang diterjemahkan oleh Yasir Rodiah dengan judul *Wanita di dalam al-Qur'an*, menjelaskan bahwa kekeliruan penafsiran terhadap ayat-ayat al- Qur'an tentang wanita lantaran ditafsirkan oleh kaum pria, bukan ditafsirkan oleh kaum wanita itu sendiri. Akibatnya, penafsiran yang dibuat hanya berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pikiran kaum pria saja. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya kekeliruan penafsiran yang menyebabkan wanita dalam posisi lemah, rendah, serta kurang dalam berbagai bidang dibanding kaum laki-laki⁹.

Namun apa yang dikatakan oleh Aminah Wadud bukanlah jawaban yang lebih moderat untuk menjembatani ketimpangan cara penafsiran tersebut, karena jika penafsiran tersebut dilakukan oleh perempuan, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya, yakni tidak menutup kemungkinan akan terjadi penafsiran yang beraroma feminis.

Permasalahan yang sebenarnya terletak pada metode penafsiran klasik yang dilakukan oleh ulama' terdahulu yang belum dapat menghasilkan sintesa kreatif dari berbagai prinsip al- Qur'an, dengan mengabaikan kenyataan bahwa al- Qur'an merupakan sebuah dokumen integral yang menyingkapkan

⁸ Abdullah, ed., *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), 66.

⁹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, "terj." Yasir Rodiah (Yaziar Radianti; Bandung Pustaka, 1994), 125-127.

maknanya secara bertahap.¹⁰ Maka tidak mengherankan jika hasil penafsiran ulama' salaf dengan menggunakan metode klasik ketika dipahami dari sudut idealis-filosofis terdapat berbagai macam kecanggungan dan pertentangan antara hasil penafsiran satu ayat dengan ayat yang lain.

Selain faktor metode penafsiran, faktor sosio-historis juga memiliki peranan penting terhadap hasil penafsiran yang mengarah pada unsure misoginis. Kebanyakan karya otoritatif dan patriarkhis bukan saja tentang tafsir al- Qur'an tapi juga tentang hukum dan hadith, tumbuh subur pada abad-abad pertama Islam, yakni abad keemasan Islam yang pararel dengan abad pertengahan Barat, di mana pada masa itu tradisi *misoginis* juga tumbuh subur di daerah. Tradisi tersebut menyusup ke dalam agama Islam melalui berbagai komentar (*syarh*) dan komentar atas komentar (*hasyiyah*).¹¹ Fakta ini menjadi sebuah penegasan kuatnya perspektif individu yang didukung oleh kondisi sosio-kultur masyarakat yang berkepentingan terhadap interpretasi teks-teks al-Qur'an dan hadith itu sendiri.

Salah satu ayat yang dijadikan argumen kuat dan mendasar dalam penafsiran al- Qur'an tentang tegaknya patriarkhi adalah surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

¹⁰ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Quran* (Minneapolis, Minnesota: Bibliotheca Islamica, 1980), xi.

¹¹ Asma Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Wanita*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2003), 45-46.

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعَتْكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”¹².

Secara implisit ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin (lebih kuat) dari pada perempuan. Dalam menafsirkan ayat tersebut sesungguhnya tidaklah cukup hanya dipandang dari kaca mata sebelah, karena pemahaman secara parsial terhadap suatu ayat justru akan menjerumuskan pada ketidakberaturan dalam menggali sebuah argumen hukum. Sangatlah dibutuhkan pandangan yang komperhensif terhadap seluruh aspek yang melatar belakannya (asbābu an-nuzūl) dan hubungan kausalitas antara satu ayat dan ayat yang lainnya sehingga ditemukan sebuah keseimbangan dalam cara pandang.

Sebagai sintesa dari ayat di atas terdapat ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sejajar. Artinya, memang terdapat beberapa aspek kewajiban dan hak yang membedakan antara keduanya, akan tetapi justru perbedaan itulah yang menjadikan adanya sebuah

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 3: 34, 84.

kesinambungan dan keseimbangan dalam tatanan kehidupan dan bukan justru dijadikan pembeda atau pembatas yang berujung pada biasanya sinergitas dalam pola kehidupan yang ideal. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesepadanan gender adalah QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹³

Relasi ayat-ayat tersebut secara esensial begitu jelas dapat menjebatani dan menjadi titik temu sebuah kesetaraan dan kesepadanan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimanapun tendensi sebelah atas penafsiran sebuah ayat tidak akan mampu menghapus sisi spirit keadilan di dalamnya.

Pada konteks tradisi pesantren, pandangan yang memberikan dasar legitimasi bagi diskriminasi, stereotyping, marginalisasi, dan subordinasi terhadap kaum perempuan yang bukan hanya pada kitab-kitab tafsir, melainkan juga dalam kitab-kitab Hadis dan fiqih terus dibaca dan dilestarikan dari waktu ke waktu, dengan cara sosialisasi secara berkesinambungan dari generasi ke generasi yang lain. Pandangan-pandangan itu diyakini sebagai hukum agama yang dinyatakan oleh teks-teks otoritatif

¹³ Ibid, 517.

secara eksplisit. Akibatnya, pandangan itu memiliki tingkat sakralitas seperti agama, sehingga gugatan dan kritik yang ditujukannya dimaknai sebagai gugatan dan kritik terhadap agama itu sendiri¹⁴.

Bagi kalangan pesantren, hasil penafsiran misiojinis tersebut merupakan tafsiran al-Qur'an dan Hadith yang paling mendekati kebenaran atas apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Bahkan sebagaimana pendidikan formal pada umumnya, antara pesantren satu dan lainnya, hampir sinergis dalam tatanan kurikulum serta penggunaan kitab-kitab kajian mereka dalam proses pembelajarannya, sehingga menghasilkan homogenitas pandangan hidup, kultural dan praktik-praktik keagamaan di kalangan kiai dan santri di seluruh nusantara¹⁵.

Keberlangsungan pendidikan pesantren dengan menjadikan kitab-kitab hasil penafsiran ulama' klasik sebagai referensi utama dan didukung budaya tradisional yang masih melekat, sangat memberikan ruang bebas sosialisasi konstruk budaya patriarkhi di lingkungan pesantren itu sendiri. Bagaimana tidak, kandungan sebagian penafsiran tersebut telah mendukung hegemoni dan superioritas laki-laki atas perempuan. Legitimasi atas nama agama tersebut akhirnya memberikan nilai lebih terhadap kiai sebagai pimpinan pesantren dalam menetapkan kebijakannya yang berhubungan dengan gender.

¹⁴ Khoriri, : *Reinterpretasi Fiqih Wanita* (STAIN Purwokerto, Jurnal Studi Gender & Anak Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009) Pp.27-40

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren "Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia"* (Jakarta: LP3ES, 2011). 88.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa kalangan laki-laki dalam masyarakat pesantren akan mendapatkan nilai lebih, sedangkan kalangan perempuan dipastikan mendapatkan implikasi negatif dari konstruksi pemahaman mereka akan hak dan kewajiban seorang wanita dalam balutan tradisi patriarkhi. Pemahaman inilah yang disebut Bourdieu dengan istilah “*inculcation*” yakni pembiasaan yang berjalan secara perlahan tidak disadari sebagai sesuatu yang bersifat kultural melainkan dipahami sebagai sesuatu yang layaknya natural dan alamiah¹⁶.

Pemahaman yang semedikian itu pada akhirnya meluas dan mengendap di bawah alam sadar sebagian besar masyarakat muslim nusantara, sehingga perempuan mempunyai peran yang subordinat di dalam masyarakat sedangkan laki-laki masih tetap eksis sebagai komunitas dominan yang ditandai semakin langgengnya model kehidupan patriarkhi di dalam masyarakat.¹⁷ Hal ini senada dengan pendapat Weber, bahwa agama dapat menjadi sumber perubahan dan tantangan sosial, dan adakalanya juga sebagai sumber keteraturan sosial dan legitimasi *status quo*.¹⁸

¹⁶ Bourdieu, *The Logic Of Practice* (Standford: Standford University Press1990) Kondisi seperti ini dapat dijadikan gejala menyimpang dari hakikat suci yang ditegaskan oleh agama atas hak-hak yang harus didapat oleh perempuan. Kedudukannya sebagai seorang istri dari suatu rumah tangga memiliki kepentingan penuh untuk mengelola dan mengontrol laju aktifitas kekeluargaan. Dari kondisi ini, hubungan relasional yang seharusnya didapatnya secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang budak sekaligus istri, menjadi terpinggirkan dari alur yang sewajarnya terjadi. Realita ini tentunya menyimpang dari kewajaran bagi pemberian peran antara satu individu dengan individu lainnya dalam keluarga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu individu dengan individu lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan . Nasaruddin Umar: *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina.2001). 53.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*. 55

¹⁸ Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Judul Asli: *Approaches to The Study of Religion* (Yogyakarta: LKiS, 2012). 280

Berbagai macam proses konstruksi patriarkhi dalam pesantren yang sudah dijelaskan di atas, menjadikan kepemimpinan pesantren identik dengan kepemimpinan patriarkhi, yaitu kepemimpinan yang senantiasa didominasi oleh kiai dan cenderung mengenyampingkan aktor lain yang sebenarnya tidak kalah penting dalam terselenggaranya pendidikan dalam pesantren, yaitu bu nyai.

Zamkhsari Dhofir mensinyalir bahwa kebanyakan Kiai khususnya di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan kerjaan kecil dimana Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan di lingkungan pesantren. Sehingga seluruh kebijakan pesantren baik dari tujuan, pelaksanaan, maupun evaluasinya menjadi otoritas Kiai. Ia ibarat raja, segala titahnya menjadi konstitusi baik tertulis maupun konvensi yang berlaku bagi kehidupan pesantren¹⁹.

Selain itu, dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang kiai mengedepankan unsur kharismanya sebagai daya tarik atas kepribadian dan sikapnya. Pemimpin yang bercorak *kharismatik* biasanya mempunyai daya tarik yang sangat besar (heroik), pengikutnya tidak dapat menjelaskan tentang ketertarikan mereka mengikuti dan mentaati pemimpin tersebut, dia (pemimpin) seolah-olah memiliki kekuatan *ghaib* (supranatural), dan

¹⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 74.

kharisma yang dimiliki tidak tergantung pada umur, ketampanan, kesehatan, ataupun kekayaannya.²⁰

Berkat kharismanya, dalam pandangan Sartono Kartodirdjo, bahwa seorang kiai di pesantren baik di masa lalu maupun sekarang dianggap sebagai figur sentral, yang diyakini mampu merencanakan kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan di Indonesia.²¹ Pengaruh seorang kiai terhadap para santrinya tidak hanya dirasakan di pesantren, tetapi juga akan terus berlanjut apabila nantinya mereka telah keluar dari pesantren. Bahkan menurut Abd. Halim Soebahar, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pengaruh seorang kiai akan selalu terus membekas di benak santrinya seumur hidup²².

Di antara perhatian yang sangat terbatas pada aktor perempuan dalam kepemimpinan pesantren, peran dan posisi nyai muncul dalam dua situasi yang bertolak belakang. Pada satu sisi, secara umum nyai memiliki kedudukan dan kekuasaan lebih rendah daripada kiai. Status dan kedudukan nyai ditentukan oleh posisinya yang hanya sebatas sebagai istri kiai. Setidaknya studi yang pernah dilakukan oleh Faiqoh melaporkan bahwa pernikahan yang dialami nyai dilakukan di luar kehendak mereka dan lebih atas dasar paksaan orang tua demi menjaga hubungan kekerabatan antar kiai.²³

²⁰ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 106.

²¹ Dalam Abd Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren*, 64. Lihat juga, Sartono Kartodirdjo, *Religious Movement of Java in the 19th and 20th Centuries* (Yogyakarta: Faculty of Letters Gadjahmada University, 1970), 114.

²² *Ibid*, 114.

²³ Faiqoh. *Nyai Agen Perubahan di Pesantren* (Jakarta: Kucica, 2003). 307

Pada sisi yang lain, nyai digambarkan memainkan peranan yang penting dalam pendidikan dan pengajaran agama di pesantren.²⁴ Nyai juga memimpin pesantren serta memiliki otoritas dalam menafsirkan ajaran agama.²⁵ Akan tetapi interaksi nyai sebagai pengajar, penafsir dan pemimpin pesantren pada umumnya terbatas hanya dengan santri perempuan dan tidak bisa melawan penafsiran-penafsiran yang beraroma patriarkhis jika hal itu merupakan penafsiran kiai.

Para kiai duduk dipuncak hirarki sebagai aktor utama yang menentukan dinamika kehidupan sosial dan memegang kekuasaan dan wewenang mutlak dalam pesantren²⁶. Artinya, jika mayoritas kiai salaf masih *apatis* terhadap istilah ‘gender’ yang dianggapnya sebagai produk barat, maka dengan segala wewenangnya, mereka senantiasa bersikeras mempertahankan kajian-kajian tradisional (*salafi*) melalui pengajaran kitab kuning sebagai benteng masuknya budaya barat.²⁷

Hal tersebut sangatlah ironis jika memandang bahwa Islam sebagai agama *rahmatan li al-’alamīn* sebenarnya memberikan apresiasi tinggi kepada wanita. Segala hal yang berusaha menyudutkan wanita baik marginalisasi, diskriminasi, ataupun subordinasi tidak pernah lahir dari ajaran Islam. Justru perlu adanya rekonstruksi terhadap pemahaman yang kabur mengenai

²⁴ Ibid, 272.

²⁵ Ibid, 272.

²⁶ Ibid, 55.

²⁷Paradigma tradisional tentang relasi kiai dan santri sebagai komunitas yang dinamis membentuk subkultur yang terbangun secara eksklusif, fanatis dan esoteris sebagai upaya dalam menjaga tradisi-keagamaan dari pengaruh dunia luar. Tentang peran Kiai sebagai *cultural broker*, yang berfungsi menyampaikan informasi-informasi baru dari luar lingkungan yang dianggap baik dan membuang (mengeliminasi) informasi yang dianggap kurang baik atau menyesatkan komunitas pesantren. Baca: Hiroko Horikoshi, *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java* (USA: The University of Illinois at Urbana-Champaign, 1976)

konstruksi gender terutama di lingkungan pesantren. Semangat ajaran Islam itulah yang kemudian mendorong sebagian nyai untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam mengekspresikan kualitas mereka untuk ikut serta menjalankan dan mengoprasionalkan roda kepemimpinan dalam menejerial pesantren.

Para bu nyai yang selama ini senantiasa dalam bayang-bayang dogma pesantren yang tidak bisa bergerak bebas dalam mengekspresikan segala bentuk kemampuan positif yang dimilikinya telah menjadi pemicu tersendiri dalam upaya penegakan gender dalam pesantren. Nyai Ainatul Mardhiyah misalnya, sebagai salah satu keturunan pendiri pesantren Lirboyo yang dalam sejarah panjangnya sangat kental dengan nuansa kepemimpinan patriarki dengan tegas mengatakan:

“Islam tidak pernah menghendaki pembatasan peran positif antara laki-laki dan perempuan, justru Islam mengharapkan *fastabiq al-khairāt* (berlomba-lomba dalam kebaikan), maka sebagai perempuan kita harus berani menunjukkan bahwa kita sebenarnya juga mempunyai kemampuan yang sama bahkan kadang lebih dari laki-laki”²⁸.

Pandangan lain muncul dari pondok pesantren al-Ishlah Bandar Kidul Kediri yaitu nyai Lilik Muhibbah yang sekarang menjabat sebagai wakil Wali Kota Kediri.

“Peran dan posisi nyai dalam kepemimpinan pesantren diupayakan mempunyai kiprah dan prestasi yang mandiri, tidak hanya *kramat gandul* (ikut-ikutan) dengan kiainya, tetapi nyai harus juga berinovasi dalam pengembangan pembelajaran di pesantren, apalagi perkembangan pesantren putri saat ini sangat signifikan, sehingga sangat memerlukan keterlibatan dari seorang nyai”²⁹.

²⁸ Nyai Ainatul Mardhiyah, *Wawancara*, Kediri, 9, Februari, 2014.

²⁹ Nyai Lilik Muhibbah, *Wawancara*, Kediri, 9, Februari, 2014.

Adanya subordinasi bagi perempuan dalam peran serta posisi kepemimpinan dalam pesantren telah membangkitkan motivasi bagi pihak bawah untuk melakukan sebuah ‘resistensi’ demi terwujudnya kepemimpinan yang berkeadilan. Keadaan yang demikian mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik patriarki dalam pesantren dan juga bagaimana bentuk resistensi yang muncul dari kalangan perempuan pesantren yang selama ini dikenal tunduk, patuh dan diam terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam pesantren.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah penelitian dapat diidentifikasi, namun jua dibutuhkan adanya batasan masalah agar penelitian ini terkonsentrasi pada konteks pembahasan secara utuh.

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang ditemukan dalam latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Ajaran Islam yang menyerukan adanya keadilan dan kesepadan hak asasi bagi pemeluknya, justru hal ini menjadi berlawanan jika dilihat dalam realitas masyarakat muslim secara umum. Agama Islam justru dijadikan legitimasi kaum laki-laki dalam menjunjung superioritasnya di atas perempuan.
- b. Penafsiran al-Qur’an dan hadith yang dilakukan oleh penafsir terdahulu cenderung bersifat *misoginistic* dan masih belum bisa lepas

dari sosio-historis yang melatarinya, sehingga belum mampu mengakomodir seluruh visi dan misi dari ajaran Islam secara integral. Ironisnya, hasil penafsiran tersebut menjadi sebuah paradigma sebagian besar umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan membentuk budaya patriarkhi yang mengakar kuat sampai saat ini.

- c. Doktrin kepemimpinan pesantren yang bersifat patriarkhi bukanlah dari setting perorangan atau karena ada niat dari pelaku (Kiai), namun hal tersebut berakar dari bangunan realitas historis kepemimpinan pesantren yang turun-temurun dari tokoh-tokoh awal pendirinya. Warisan tradisi tersebut telah mengakar kuat dan hampir tidak mungkin untuk dirubah. Dogma-dogma patriarkhi yang sudah melekat berjalan begitu saja di bawah alam sadar mereka meskipun saat ini mulai nampak adanya perlawanan dalam upaya menegakkan keadilan gender oleh perempuan-perempuan pesantren.
- d. Kajian-kajian yang menjadi bagian kurikulum pembelajaran dalam pesantren dengan menggunakan kitab-kitab klasik patriarkhis hasil penafsiran ulama' terdahulu sebagai rujukan resmi, serta doktrin-doktrin patriarkhi dari para kiai dan ustadz saat mengajar secara perlahan terkonstruksi dan membentuk paradigma santri. Akhirnya, pesantren telah menjadi salah satu agen dalam pelestarian budaya patriarkhi yang terstruktur secara masif dalam lingkaran legitimasi pendidikan agama Islam.

e. Tidak semua aktor pesantren menyetujui budaya patriarkhi dalam pesantren. Umumnya mereka yang tidak menyetujui adalah masyarakat perempuan pesantren yang dalam konteks ini adalah anggota pesantren yang sebagian hak serta kewajibannya tereduksi akibat kuatnya budanya patriarkhi dalam pesantren. Subordinasi tersebut telah memunculkan resistensi dari kalangan perempuan pesantren dalam upaya menegakkan kesetaraan gender dalam pesantren.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang memungkinkan dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut.

- a. Realitas patriarkhi dalam pesantren di Kabupaten Kediri
- b. Resistensi bu nyai atas dominasi kiai dalam kepemimpinan pondok pesantren di Kabupaten Kediri
- c. Peneliti juga membatasi lokasi penelitian yang hanya terfokus pada Pondok Pesantren Lirboyo, pondok pesantren Darussalam Sumbersari, pondok pesantren al-Ishlah Bandar dan pondok pesantren al-Hikmah Purwoasri. Menurut peneliti, keempat pesantren tersebut merupakan representasi dari seluruh pesantren di Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realitas kepemimpinan dalam pesantren di Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana resistensi bu nyai terhadap kepemimpinan patriarkhi pondok pesantren di Kabupaten Kediri?

D. Tujuan Penelitian

1. Menemukan realitas kepemimpinan dalam pesantren di Kabupaten Kediri.
2. Menemukan resistensi bu nyai terhadap kepemimpinan patriarkhi pondok pesantren di Kabupaten Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam masalah gender, feminisme, dan patriarkhi di lingkungan pesantren pada khususnya dan kehidupan masyarakat luas pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan paradigma baru bagi kaum santri secara khusus dan masyarakat secara umum tentang keadilan gender dan pentingnya membuka cakrawala keilmuan yang lebih luas, agar tidak terjebak pada pemahaman konservatif yang cenderung diskriminatif.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yang berorientasi pada teori hegemoni Antonio Gramsci. Antonio Gramsci

adalah seorang pemikir serta pendiri Partai Komunis Italia. Ia telah berhasil membangun sebuah teori praktis untuk memahami formasi tertib dunia (*world order*) maupun transformasi historis atas perubahan tertib dunia. Teorinya muncul dari pengalaman pribadinya yang melihat kegagalan partai komunis yang dipimpinnya dalam proses transformasi politik di Italia. Gramsci berusaha memahami mengapa fasisme dapat meraih kemenangan dan memantapkan *status-quo* politiknya. Pemahaman tersebut dijadikan sebagai pijakan awal untuk menemukan strategi yang tepat dalam upayanya meruntuhkan hegemoni fasisme³⁰

Dalam upaya menjelaskan teorinya, Gramsci mengenalkan konsep *civil society*. Konsep *civil society* dalam pemikiran Gramsci memiliki dua peran yang berbeda, bahkan berbenturan satu sama lain. *Civil society* adalah agen yang pada saat bersamaan mampu melindungi dan mempertahankan *order* (pemerintah yang berkuasa) sekaligus juga dapat bertindak sebagai agen yang mengikis *status quo* dan menciptakan orde sosial yang baru. Di satu sisi, *civil society* berkolaborasi dengan negara untuk menghegemoni rakyat dan mengontrol perjuangan kelas, namun di sisi lain *civil society* dengan posisinya yang independen dari negara juga mampu menciptakan perjuangan kelas itu sendiri dengan melakukan gerakan *counter-hegemony*. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Gramsci membuat formula formasi negara yakni “state” = *political society* + *civil society*³¹.

³⁰ El-Ojeili, Chamsy dan Patrick Hayden, *Critical Theory of Globalization* (New York: Palgrave MacMillan 2006). 214

³¹ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*. dalam Q. Hoare and G. Nowell-Smith eds. (New York: International Publishers 1971). 263

Artinya, negara dalam konsepsi Gramsci dapat eksis karena mempertahankan dua hal, yakni koersi yang diwakili oleh masyarakat politik (*political society*) dan hegemoni konsensual yang dijalankan oleh masyarakat sipil (*civil society*). Hegemoni, dalam definisi Gramsci, adalah serangkaian dominasi atas sebagian besar aspek kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, politik, hingga moral dan intelektual, dengan mengedepankan aspek-aspek konsensual nonkoersif³².

Dalam kaitannya dengan masyarakat politik dan masyarakat sipil yang melindungi kekuatan *status quo* negara dalam jangka waktu yang lama, Gramsci cenderung menekankan pentingnya hegemoni yang mengedepankan faktor-faktor non kekerasan dan peran masyarakat sipil adalah faktor determinan. Sebagaimana dikatakannya: “sangat mungkin untuk membayangkan elemen memaksa dari negara menjadi layu sedikit demi sedikit, sejalan dengan munculnya elemen yang menonjol dari masyarakat sipil.”³³

Saat kekuatan hegemoni mampu diraih, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah berjalan dalam wilayah hubungan yang kompromistis dan konsensual. Dengan kata lain, kelompok subordinat menerima dengan sadar dominasi para hegemon. Mereka yang diperintah telah menerima ide

³² Simon, Roger, *Gramsci's Political Thought* (London: Lawrence and Wishart 1982). 21

³³ Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*. 263

dan nilai utama dari mereka yang memerintah (para hegemon) sebagai nilai dan ide mereka sendiri³⁴

Dalam hegemoni terdapat hubungan antar kelas melalui kekuatan sosial. Hubungan ini telah mendapat dukungan dari kelas sosial lain. Hubungan dijaga dengan cara mempertahankan sistem tersebut melalui berbagai bentuk perjuangan, menciptakan kontrol sosial, terutama yang bersifat ideologis. Hal ini menciptakan jurang dan kesenjangan sosial tertentu bagi kelas yang tidak setuju sebab hal itu dianggap sumber kekuasaan tunggal.

Hal ini mengingatkan pada konsep Gramsci tentang negara integral. Yaitu kekuasaan tunggal dipegang oleh kelas yang berkuasa tersebut dengan konsensus:

“Dalam suatu negara integral di dalamnya ada tujuan-tujuan yang didasarkan pada seperangkat gagasan dan nilai, suatu falsafah bersama yang dimiliki oleh sebagian besar orang berdasarkan persetujuan yang aktif dan diberikan secara bebas. Persetujuan tidak dimanipulasi dan tidak dihasilkan oleh ketakutan terhadap kekuatan koersif”.³⁵

Sebenarnya hegemoni sendiri melibatkan pendidikan dan pemenangan konsensus dari pada pemakaian kekuatan brutal dan koersi semata. Hegemoni lebih terkait pada pengetahuan yang berdasarkan kesepakatan, dari pada kekerasan dan perebutan kekuasaan. Hegemoni bukanlah dominasi dengan

³⁴ Cox, Robert W., *Gramsci, Hegemony, and International Relations: an Essay in Method*. dalam Stephen Gill ed . *Gramsci Historical Materialism and International Relations*. (Cambridge: Cambridge University Press 1993).

³⁵ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Kamdani Imam Baehaqi (terjemahan), (Yogyakarta: Insist, 1999), 21.

menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan pendekatan politik dan ideologi³⁶.

Gramsci mengatakan bahwa kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan³⁷. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa relasi atau hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain dapat menciptakan suatu kelas lain. Secara tidak langsung kekuatan kelas lain tersebut menanamkan ideologinya kepada kelas tersebut, terutama dalam bentuk kepemimpinan intelektual dan kelas lain tersebut dapat menerimanya dengan terpaksa ataupun sukarela. Hal ini dapat pula terjadi sebaliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses hegemoni harus dilakukan terus-menerus atau berkelanjutan agar ideologi dapat terus ditanamkan sekaligus terus disetujui oleh kelas tersebut.

Kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik, adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dan kekuatan dari kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis³⁸. Dengan adanya kelas hegemonik atau kelas yang menghegemoni tersebut maka terbentuk kelas lain yang mendukung ideologi kelas hegemonik tersebut. Kelas yang terhegemoni ini dapat berkembang menjadi kelas hegemonik pula. Kelas hegemonik ini dapat terbentuk dari konsep supremasi hegemoni terutama strategi kepemimpinan sekaligus melalui konsensus. Kelas hegemonik yang berhasil membangun blok kekuatan sosial yang mampu bertahan dan mempertahankan aliansinya

³⁶Ibid. 30

³⁷Ibid. 30

³⁸Ibid, 22.

melalui perjuangan politik dan ideologis sepanjang periode sejarah tersebut disebut Gramsci blok historis (*histories bloc*).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktik hegemoni menekankan lebih kepada konsep kepemimpinan dan konsensus. Ideologi ditanamkan hampir di setiap gagasan dan bidang yang dapat diterima kelas bawah dan dilakukan secara terus-menerus dan bahkan dalam bentuk negosiasi. Negosiasi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan suatu harapan. Namun ketika jalan negosiasi tidak mendapatkan hasil, para buruh (kelas bawah atau masyarakat sipil) akan melakukan resistensi (perlawanan)³⁹. Hal ini memperlihatkan kesadaran dan menumbuhkan akal sehat bagi kelas tersebut sehingga tercipta pendapat umum (*common sense*) yang nantinya akan menjadi kekuatan.

Dari penyebaran gagasan-gagasan tersebut, terlihat pendapat umum lebih memerankan peranan penting dikarenakan melibatkan individu itu sendiri sebagai seorang intelektual. Dalam hal ini akan terlihat pula mana individu, masyarakat atau kelas hegemonik dan kelas yang terhegemoni serta kelas yang kontra terhadap hegemoni.

Masyarakat yang tidak setuju (terutama masyarakat sipil) dengan adanya kelas hegemonik tersebut karena dinilai menindas kepentingan mereka dapat membentuk strategi perlawanan. Masyarakat sipil merupakan suatu wadah kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (*subordinate*)

³⁹ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 130.

dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternatif – hegemoni tandingan (*counter-hegemony*)⁴⁰.

Dalam arena sosial semacam itu terlihat tidak ada ruang atau ruang publik bagi suatu masyarakat untuk berbuat lain di luar kerangka ideologi kelompok hegemonik. Individu akan dapat keluar dari keadaan yang membatasi dirinya dengan cara melakukan *counter* hegemoni. Adanya intelektual *counter* hegemoni membuahakan suatu siasat untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok hegemonik tersebut. Kumpulan intelektual *counter* hegemoni ini dapat membentuk intelektual kolektif.

Dalam setiap masyarakat kelompok intelektual memegang peranan penting. Dalam hal ini Gramsci kemudian membedakan intelektual menjadi dua macam, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional adalah orang-orang yang mengisi posisi ilmiah, seperti sastra, ekonomi hukum, dan sebagainya, termasuk mereka yang terlibat di sekolah, universitas, dan lembaga Negara⁴¹. Pada intelektual tradisional, mengarahkan mereka untuk melihat diri sendiri secara bebas dari segala persekutuan kelas atau peran ideologis. Artinya, kelompok intelektual tradisional ini melihat kehidupan sosial dari dalam diri mereka sendiri dan tidak terpengaruh oleh kelas dan ideologi suatu kelompok⁴².

Intelektual organik adalah kelompok yang terbentuk secara organik, yaitu mereka yang merupakan bagian institutif perjuangan kelas. Intelektual organik terbuka untuk memihak kelas tertindas. Intelektual organik adalah

⁴⁰ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, 28.

⁴¹ *Ibid*, 27

⁴² *Ibid*, 27

para intelektual yang tidak sekadar menjelaskan kehidupan sosial dari luar berdasarkan kaidah saintifik, tetapi juga memakai bahasa kebudayaan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman riil yang tidak bisa diekspresikan oleh masyarakat sendiri⁴³. Dengan demikian intelektual organik adalah mereka yang mampu merasakan emosi, dan semangat yang dirasakan kaum tertindas, memihak dan mengungkapkan apa yang dialami mereka.

Dari penjabaran tersebut, terlihat bahwa *counter* hegemoni adalah suatu bentuk tandingan yang dapat memberikan perlawanan terhadap hegemoni. Pelaku *counter* hegemoni ini disebut sebagai intelektual *counter* hegemoni. Salah satu ciri yang menonjol dari *counter* hegemoni adalah hadirnya intelektual organik sebab ia menentang bentuk penindasan hegemoni dan dengan begitu ia dapat melakukan perlawanan. Perlawanan pada akhirnya merupakan kelanjutan dari *counter* hegemoni.

Dalam penelitian tentang resistensi bu nyai terhadap dominasi kepemimpinan pondok pesantren di Kabupaten Kediri jika melihat dari kerangka teori Gramsci, maka dapat disimpulkan bahwa munculnya resistensi bukanlah suatu yang tiba-tiba dan tidak terdapat akar penyebabnya, namun di situ pasti terdapat permasalahan.

Dominasi laki-laki secara berlebihan dalam pesantren yang hampir tidak memberikan kesempatan serta peluang bagi kalangan perempuan akan menimbulkan kekuatan tersendiri bagi kelas yang tersubordinasi. karena

⁴³ Franz Magnis Suseno, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 180.

menurut Gramsci dominasi harus melalui konsensus yang disepakati oleh seluruh kelas baik yang memimpin atau yang dipimpin.

Jika hal ini terus terjadi dan kelas yang ter subordinasi berhasil mendapatkan kekuatan maka terjadilah gerakan resistensi. Gerakan ini akan terus berlanjut hingga terjadi *counter* hegemoni. Namun tidak semua gerakan resistensi membuahkan hasil kecuali di dalamnya terdapat intelektual organik yang mampu memobilisasi gerakannya menuju perubahan yang nyata. Dalam konteks pesantren saat ini, intelektual organik mulai muncul dari golongan bu nyai yang dinilai akan senantiasa menjadi salah satu penggerak serta pengawas dari sistem yang berjalan di pesantren.

G. Penelitian Terdahulu

1. Perilaku Kepemimpinan Kolektif di Pondok Pesantren (Studi Multisitus pada Pesantren Bani-Djauhari, pesantren Bani-Syarqawi Sumenep, dan Pesantren Bani-Basyaiban Pasuruan)⁴⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku kepemimpinan kolektif di pesantren. Beberapa hal yang dapat dideskripsikan sehubungan dengan fokus penelitian ini adalah; perilaku kepemimpinan kolektif di pondok pesantren dalam proses pengambilan keputusan, pengendalian konflik, dan pembangunan tim. Sub fokusnya adalah; perilaku kepemimpinan, sumber otoritas dan *ghirah*

⁴⁴ Atiqullah (Disertasi) Universitas Negeri Malang, 2009.

kepemimpinan kolektif dan proses pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dan pembangunan tim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif berjenis studi multi situs pada tiga pondok pesantren di Jawa Timur; yaitu pesantren Bani-Djauhari Prenduan, pesantren Bani-Syarqawi Guluk-Guluk Kota Garam Sumekar dan pesantren Bani-Basyaiban Kraton Kota Santri. Dalam menggali data peneliti banyak menggunakan wawancara mendalam dengan para kiai fungsionaris *Dewan Riasah*, *Dewan Masyayikh*, dan *Majlis Keluarga*, serta dengan para pengurus harian-*majlis a'wan*, *asatidz*, dan santri. Data juga didapat melalui observasi dan dokumentasi, dan data-data dianalisis secara interaktif dan komparatif konsan.

2. Kebertahanan Pesantren Salaf Di Tengah Arus Modernisasi Pendidikan: Fenomena Pondok Pesantren Al-Is'af Kalabaan, Guluk-Guluk, Sumenep⁴⁵.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami: 1) Aspek-aspek kebertahanan Pondok Pesantren al-Is'âf menghadapi modernisasi pendidikan, 2) latar belakang pemikiran Pengasuh Pondok Pesantren Al-Is'âf bertahan menghadapi modernisasi pendidikan, 3) faktor-faktor yang mempengaruhi kebertahanan pesantren al-Is'âf menghadapi modernisasi pendidikan, 4) implikasi kebertahanan Pesantren al-Is'âf menghadapi modernisasi pendidikan terhadap proses pembelajaran di pesantren tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

⁴⁵ Mohammad Muchlis Solichin (Desertasi) IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

pengamatan langsung dan partisipan; yaitu peneliti mengamati secara langsung dan terlibat dengan aktivitas obyek untuk mengetahui fenomena yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, dengan pengungkapan yang sistematis untuk menguji hipotesis.

Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam atau *depth interview*. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menambah bukti dan sumber-sumber penelitian, yang dapat berfungsi untuk verifikasi nama-nama dan judul yang diperoleh dalam wawancara, menambah rincian spesifik guna mendukung informasi dan sumber-sumber lainnya serta membuat infrensi dari dokumen-dokumen tersebut.

3. Tipologi Perubahan dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf⁴⁶.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pengasuh, *ustadz*, santri pesantren *salaf* di empat pondok pesantren di Jawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, *Focus Group Discussion*, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*, sedangkan untuk analisis data digunakan teknik analisis induktif.

4. Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Madiredo Pujon Malang)⁴⁷

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan peran kepemimpinan perempuan dalam pengembangan

⁴⁶ Dr. Marzuki, M.Ag. dkk. (Penelitian Universitas) Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

⁴⁷ Istiah (Tesis), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007

pesantren. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi peran serta, dan dokumentasi. Interpretasi data menggunakan perspektif fenomenologis. Sedangkan untuk mendapatkan kevalidan data digunakan teknik observasi terus menerus, memanfaatkan data yang dianalisis, mencari kasus yang bertentangan, melibatkan informan untuk *mereview* data (*member check*), mendiskusikan data dengan pihak tertentu, memeriksakan kembali dengan catatan lapangan.

5. Kepemimpinan Kiai dalam Pendidikan Watak Santri. Studi Multisitus di Pondok PETA Tulungagung dan Pondok Pesantren Garuda Loncat Blitar⁴⁸.

Penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesulukan Thoriqot Agung Tulungagung sebagai situs I dan Pondok Pesantren Garuda Loncat Blitar sebagai situs II, dengan tujuan: (1) ingin mendeskripsikan bagaimana pola kepemimpinan Kiai dalam sistem pendidikan watak santri, (2) ingin mendeskripsikan bagaimana pandangan pengurus/ustad terhadap kepemimpinan Kiai, (3) ingin mendeskripsikan bagaimana pandangan santri terhadap kepemimpinan Kiai, (4) ingin mendeskripsikan bagaimana peran Kiai dalam pendidikan di pesantren, dan (5) ingin mendeskripsikan faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan watak santri.

⁴⁸ Mujiyono Mujiyon (Tesis), Universitas Negeri Malang, 2010.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan multisitus, dengan jenis komparasi konstan. Data penelitian yang berupa rangkaian kalimat-kalimat diperoleh dari tiga macam sumber, yakni diri peneliti, informan 11 orang dari Situs Pondok Pesulukan Thoriqot Agung dan 11 orang dari Situs Pondok Pesantren Garuda Loncat, serta dokumen-dokumen yang relevan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi mendalam dan dari data-data dokumen yang terkait. Instrumen yang digunakan digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrumen manusia yaitu diri peneliti dan pedoman pengumpulan data serta alat perekam sebagai pelengkap. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga kesahihan data penelitian dilakukan dengan perpanjangan peneliti di lapangan, triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta dengan review informan. Kegiatan analisis data di mulai dari semenjak pengumpulan data di lapangan, berkelanjutan hingga analisis data setelah semua data terkumpul.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat diketahui, bahwa penelitian ini berbeda baik dari segi fokus masalah maupun lokasi penelitian, dan yang lebih penting lagi hasil penelitian ini sebagai referensi kajian-kajian diskusi di lingkungan pesantren di Kabupaten Kediri, sehingga mampu mengangkat kembali derajat wanita pesantren pada posisi idealnya.

H. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian tentang patriarkhi dalam pesantren salaf ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mencari titik temu antara bentuk teori dengan fenomena yang ada, dengan mengungkapkan respon atau tanggapan obyek penelitian. Dengan harapan dapat memberikan gambaran yang komperhensif terhadap obyek maupun subyek dalam penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu digunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikatakan Moleong dengan mengutip pendapat Bogdan dan Taylor adalah “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”.⁴⁹

Pendekatan kualitatif menjadikan peneliti sebagai subjek penelitian yang fleksibel, mampu mendekati studi dengan pemikiran terbuka, dan tidak akan membuat asumsi sebelum riset dimulai. Oleh sebab itu, peneliti dalam memilih pendekatan menggunakan *grounded theory* yang merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematis, yaitu peneliti menggunakan teori yang menerangkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi mengenai suatu topik pada level konseptual yang luas.⁵⁰

⁴⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2005). 4

⁵⁰ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di pondok pesantren di Kabupaten Kediri, yaitu pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Darussalam Sumbersari, pondok pesantren al-Ishlah Bandar dan pondok pesantren al-Hikmah Purwoasri. Empat pondok tersebut sampai saat ini masih dianggap sebagai *icon* pendidikan pesantren di kabupaten Kediri, bahkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan empat pondok tersebut menurut peneliti sangat cukup mewakili seluruh pondok pesantren yang berada di Kabupaten Kediri.

3. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, bersikap selektif, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjangkau data sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya. Peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.

4. Sumber Data

Berdasarkan jenis-jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan melalui 2 cara, yaitu :

- a. Sumber literatur (*field literature*) yaitu sumber data yang digunakan untuk mencari landasan teori tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan buku-buku perpustakaan, jurnal, majalah, internet, dan lainnya. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan literatur-literatur yang

membahas tentang patriarki dan hubungannya dengan perilaku keagamaan dalam pesantren, teori dalam konteks analisis studi agama, dan juga beberapa literatur pendukung lainnya.

b. *Field research* adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara terjun langsung ke pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in, pesantren Darussalam, Pesantren Al-Ishlah dan pesantren Al-Hikmah Kediri, untuk memperoleh data yang lebih konkrit yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data ini ada 2 macam, yaitu :

1) Data Primer, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti.⁵¹ Data primer yang dimaksud adalah elemen penting pesantren seperti kiai, nyai, ustadz, santri dan dokumen-dokumen penting tentang pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren al-Ishlah Bandar, pondok pesantren Darussalam Summersari dan pondok pesantren al-Hikmah Purwoasri.

2) Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti,⁵² misalnya dari keterangan atau publikasi lain selain data primer di atas seperti data dari pemerintah Kabupaten Kediri, keterangan masyarakat sekitar penelitian, dan sebagainya. Data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.⁵³

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007). 308

⁵² *Ibid.* 309

⁵³ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1994). 34

5. Metode Penentuan Sumber Data

Tehnik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan model *purposive* yaitu pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang sudah diketahui sebelumnya.⁵⁴ Tehnik ini dapat dilakukan dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel, sehingga dapat dihasilkan informasi yang jelas mengenai topik penelitian dan mampu merepresentasikan pandangan mayoritas masyarakat pesantren.⁵⁵

Tahapan-tahapannya sebagaimana berikut:

- a. Memilih beberapa pesantren di kabupaten Kediri sebagai sampel dari objek penelitian, yaitu pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren al-Ishlah Bandar, pondok pesantren Darussalam Sumbersari dan pondok pesantren al-Hikmah Purwoasri. Pondok Pesantren yang dipilih adalah pesantren yang representatif pada pokok kajian dan dapat mewakili mayoritas pesantren salaf di Kabupaten Kediri.
- b. Memilih beberapa nara sumber dari 1) pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren al-Ishlah Bandar, pondok pesantren Darussalam Sumbersari dan pondok pesantren al-Hikmah Purwoasri sebagai informan penting dalam proses pengumpulan data. Adapun nara sumber yang dipilih adalah KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, KH. A.

⁵⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta Renika Cipta, 2003). 128

⁵⁵ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 98

Zaenuri Faqih, Nyai Hj. Ainatul Mardhiyah, Nyai Hj. Roikhanah Faqih. Nyai Hj. Lilik Muhibbah dan Nyai Hj. Istibsyarah.

Di sisi lain, penelitian ini membutuhkan keterlibatan dan penghayatan langsung peneliti terhadap obyek di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam hal ini adalah peneliti itu sendiri yang akan langsung berhadapan dengan para subyek yang diteliti.

6. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini disamping perlu menggunakan metode kualitatif yang tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperoleh data yang obyektif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Observasi

Menurut Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Cara yang paling efektif dalam metode observasi adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Oleh sebab itu metode ini dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam skala bertingkat.⁵⁶

⁵⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 204.

Dalam pelaksanaan observasi peneliti telah menyusun angket dan blangko penilaian yang berorientasi pada kultur serta tradisi pesantren dalam pola manajerial kepemimpinan yang berlangsung.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵⁷

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang tersebut dalam sumber data primer.

c. Metode Dokumenter

Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁵⁸ Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak langsung untuk ditujukan kepada subyek penelitian. Pada akhirnya, dokumentasi tersebut menjadi sumber data

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, 133.

⁵⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 206.

yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

7. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan mengolah data untuk meningkatkan pemahaman penelitian. Menurut Pottou yang dikutip Moleong analisis data adalah proses mengatur antara data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵⁹

Sedang menurut Bogdan dan Taylor yang juga dikutip Moleong bahwa analisis data adalah proses yang merinci usaha formal, secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan hipotesis kerja itu.⁶⁰

Dengan demikian definisi tersebut dapat didefinisi-sintetiskan menjadi analisis proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisa datanya *deskriptive reflective thinking*, karena dengan teknik ini bisa didapat data-data dari sumber yang lebih terinci dan terpadu serta mencapai taraf kevalidan dan reliabelitas.

⁵⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. 280

⁶⁰ Ibid .208.

Pengertian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁶¹

Sedang teknik *reflektif thinking* merupakan cara modern untuk memperoleh pengetahuan yang tidak lain adalah pengkombinasian jitu dari cara berfikir deduktif dan induktif. Dalam hal ini peneliti berjalan hilir mudik antara kutub-kutub induksi-deduksi persis yang disebut Jhon Dewey "*Reflective thinking*".⁶² Pengertian dari cara berfikir deduktif adalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas atau jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.

Sedangkan cara berfikir induktif bertujuan untuk membentuk pengetahuan umum yang kemudian akan dijadikan dasar deduksi itu, dijadikan premis mayor dari pada silogisme-silogisme. Berfikir deduktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶³

⁶¹ Nazir, *Metode Penelitian*. 63

⁶² Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994). 46.

⁶³ Ibid. 46.

8. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk memenuhi keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Kegiatan tersebut mengharuskan peneliti untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena peneliti dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distori dan dapat membangun kepercayaan subyek.

b. Ketentuan Pengamatan

Peneliti dengan maksud menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan dan isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analistik dengan rekan-rekan sejawat.⁶⁴ Dengan demikian terdapat saran, kritik dan masukan dari rekan-rekan tersebut sehingga hasil penelitian lebih akurat dan objektif.

9. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini melalui tahapan-tahapan sesuai dengan model penahapan Moleong, yaitu :

⁶⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. 175.

- a. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan mencari permasalahan penelitian melalui bahan-bahan tertulis (kajian pustaka), menentukan fokus penelitian, menghubungi lokasi penelitian, menyusun usulan penelitian dan seminar usulan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi kegiatan pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian dan pencatatan data.
- c. Tahap analisis data, meliputi analisis data, penafsiran data, pengecekan keabsahan data dan memberikan makna.
- d. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan menyusun hasil penelitian dan perbaikan hasil penelitian.

10. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam disertasi ini saling memiliki keterkaitan secara substansial mulai dari bab pertama sampai bab akhir. Untuk memberikan gambaran alur pembahasan supaya dapat diketahui alur logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian lain, maka pembahasan disistematisir sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini berupaya mendiskripsikan arah pembahasan disertasi secara umum. Dalam bab ini juga dipaparkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagai arah dari ketertarikan peneliti dan keunikan masalah yang dimunculkan; serta dipaparkan juga identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Untuk mempertegas orisinalitas, maka pada disertasi ini juga dipaparkan kajian pustaka dan selanjutnya dideskripsikan

secara terperinci mengenai metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan mengenai gambaran umum tentang ideologi patriarkhi dan resistensi.

Bab ketiga, membahas tentang realitas patriarkhi dalam pesantren di Kabupaten Kediri.

Bab keempat, membahas tentang respon bu nyai atas kepemimpinan kiai dalam pesantren di Kediri.

Bab kelima, adalah penutup yang memformulasikan beberapa point penting sebagai kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini semakin memperjelas temuan-temuan penelitian baik yang bersifat teoritis, paradigmatis, ataupun tipologis.